

Strategi Islamisasi Fiskal Dan Moneter Dunia**Ai Imas Mursyidah Zein¹⁾, Yadi Janwari²⁾, Sofian Al-Hakim³⁾**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mursyidah.zein@gmail.com¹⁾, yadijanwari@uinsgd.ac.id²⁾,
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id³⁾**ABSTRAK**

Fenomena di setiap negara, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan inti yang berpengaruh pada penurunan angka inflasi. Sistem fiskal dan moneter yang adil hanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sedangkan untuk prinsip seperti kapitalisme, komunisme, dan sosialisme terlalu lemah untuk menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan serta memahami mutu hidup. Kajian ini hadir untuk mencoba melakukan penjabaran mengenai strategi Islamisasi kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Kajian ini berupa sebuah penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang tepat tentu akan memiliki dampak positif yang kuat terhadap terjadinya kestabilan ekonomi dan mampu menahan laju inflasi. Oleh karena itu, isu kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter terkait stabilisasi mikro hingga makro ekonomi menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam ekonomi Islam hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya mengarahkan kebijakan fiskal dan moneter menuju keadilan sosial, keberlanjutan, terminimalisirnya ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kebijakan fiskal harus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, mempromosikan keadilan distributif, dan menjaga kesejahteraan masyarakat luas. Nilai Islam ini terletak pada prinsip keadilan dan kesejahteraan yang didukung oleh nilai *at-tauhid*, *al-'adalah*, *al-amar al-ma'ruf wa an-nahy al-munkar*, *tasamuh*, *al-musawat* dan *al-huriyyat*.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Fiskal, Moneter, Kesejahteraan.

ABSTRACT

The phenomenon in every nation is the credibility of fiscal and monetary policy is the core policy that affects the reduction of inflation. A fair fiscal and monetary system is only based on Islamic principles, while principles such as capitalism, communism, and socialism are too weak to uphold an equitable economic system and quality of life. This study attempts to elaborate on the Islamization strategy of fiscal and monetary policy. The research uses a qualitative approach with a literature study. This study is analytical descriptive research. The results of this study show that the right fiscal and monetary policies will certainly have a strong positive impact on economic stability and be able to withstand the rate of inflation. Therefore, the issue of fiscal and monetary policy credibility related to micro to macroeconomic stabilization has become a concern in recent years. In Islamic economics, what needs to be emphasized is the importance of directing fiscal and monetary policy towards social justice, sustainability, minimizing income inequality and promoting inclusive growth. In a sense, fiscal stimuli should be aimed at reducing income inequality, promoting distributive justice, and safeguarding the welfare of society at large. This Islamic value lies in the principles of justice and

welfare supported by the values of at-tauhid, al-'adalah, al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar, tasamuh, al-musāwat and al-huriyyat.

Keywords: *Islamic Economics, Fiskal, Monetary, Welfare.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam sangat fleksibel dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan manusia yang terus berkembang. Meskipun tidak semua solusi sudah tertulis secara detail, namun prinsip-prinsip dasarnya sudah ada dalam ajaran Islam. Karena itulah, hukum Islam memiliki kemampuan untuk selalu relevan (*takamul*) dan menyesuaikan diri dengan zaman (*taharuk*) (Hakim, 2011)

Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola kekayaan negara agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara teknis politik dalam ekonomi Islam lebih dikenal dengan *Siyasah Maliyah* atau *Tadakhul ad-Daulah* (intervensi pemerintah). Istilah ini dikembangkan oleh Ash-Shadr (As-Shadr, 1987) yang berkesimpulan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam sangat penting. Negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan hukum Islam dan juga bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan atau jaminan sosial (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*) dan keadilan sosial (*At-Tawadzun Al-Ijtima'i*) bagi seluruh rakyatnya.

Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah, dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sebagai khalifah-Nya, manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Semua ciptaan lainnya, seperti matahari, bulan, langit (cakrawala), telah ditakdirkan untuk digunakan oleh manusia. Dengan demikian, Islam sangat memperingatkan tentang *dzalim* dan perilaku buruk dalam ekonomi. (Suntana, 2019)

Negara menyediakan sarana bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan bagi kehidupannya, salah satunya adalah dukungan Islam bagi manusia untuk bekerja. Secara umum, mekanisme tidak langsung ini dilakukan dengan membuat beberapa poin; kewajiban bekerja, penyediaan lapangan kerja, kewajiban ahli waris, tanggung jawab tetangga, dan subsidi *Baitul Māl*. (Suntana, 2019) Begitupun dalam hal stabilitas harga yang mesti dijaga, dan hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam teori ekonomi klasik menyatakan bahwa kebijakan moneter berperan penting dalam mengendalikan tingkat harga. Sementara itu, teori fiskal mengenai tingkat harga menyoroti bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan dengan tingkat inflasi. Beberapa penelitian mencatat bahwa peningkatan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu tingkat harga yang paling penting. (Kandil, 2005; Nguyen, 2015; Raji et al., 2014) Variabel moneter lainnya seperti suku bunga dan nilai tukar juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Fenomena di Indonesia sendiri, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter dalam penelitian (Nguyen & Chapra) (Nguyen, 2015) merupakan kebijakan inti yang berpengaruh pada penurunan angka inflasi. Dalam implementasinya, pemerintah membuat kebijakan fiskal yang terperinci dan ketat. Kemudian, Bank Sentral atau Bank Indonesia membuat rancangan moneter agar tingkat inflasi terus berkurang setiap tahunnya. Kejadian ini diupayakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008 hingga 2010.

Berdasarkan pandangan Chapra (Chapra, 2000b) bahwa sistem fiskal dan moneter yang adil hanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sedangkan untuk prinsip seperti kapitalisme, komunisme, dan sosialisme terlalu lemah untuk menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan serta memahami mutu hidup. Alasannya dapat mengacu pada pandangan Al-Qardhawi (Al-Qardawi, 1995) menjelaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan setiap hak kepada pemiliknya masing-masing tanpa berlebihan dan mengurangi. Sedangkan kapitalisme memandang konsep keadilan berdasarkan kebebasan. Berbicara mengenai keadilan distribusi, jangan salah terjebak dalam pemerataan pendapatan karena tidak mungkin mengikuti *sunnatullah*.(Gustiawati, 2016)

Dalam Ekonomi Islam dijelaskan bentuk upaya manusia khususnya umat Islam dalam pengelolaan sumber daya agar mencapai keuntungan yang berdasarkan pada sumber ajaran Islam, yaitu Qur'an dan Hadits.(Mukhlis, 2019) Melalui penjabaran di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai strategi Islamisasi kebijakan fiskal dan moneter.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengimplementasikan telaah data melalui cara investigasi substansi, yang mencari variasi data dari berbagai sumber data yang berbentuk karya tulis/tulisan, simbol, gambar, dan dokumen terkait.(Sugiono, 2017) Sumber data ini berasal dari berbagai karya di bidang ekonomi.

Maka dari itu, penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Metode ini digunakan dengan membaca sejumlah buku, dokumen, data, informasi dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis pembahasan berkaitan dengan tema penelitian, (Sugiono, 2017) yaitu strategi Islamisasi kebijakan fiskal dan moneter. Adapun jenis penelitian dalam kajian ini berupa sebuah penelitian deskriptif analitik, dimana penelitian ini mengacu pada sebuah relevansi dan juga perbandingan terhadap seperangkat data dengan data lainnya yang diperoleh oleh penulis, sebagai uraian untuk memberikan berbagai deskripsi, dan analisa dalam menjelaskan hasil yang ditemukan dalam kajian ini.(Koto, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Fiskal dan Moneter Menurut Islam

Hukum Islam memiliki aturan khusus untuk mengatur masalah ekonomi. Pembahasan ini berada dalam kajian *fiqh*. Adapun ilmu *Fiqh* ditujukan untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar *fiqh* itu dapat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Syarat tersebut adalah mentransformasikan *fiqh* menjadi *qanūn* (Undang-Undang). Karena pada dasarnya *fiqh* itu tidak memiliki daya ikat yang kuat dan tidak dapat memaksa sebagaimana *qanūn*. Maka dari itu, ketika *fiqh* telah bertransformasi menjadi *qanūn* dan dijadikan sebagai ketentuan dalam hukum positif, maka *fiqh* akan memberikan daya paksa untuk mengatur masyarakat.

Secara substansial *fiqh* terbagi menjadi dua di antaranya ibadah dan muamalah dalam aspek yang luas. *Fiqh* ibadah memiliki cakupan ruang lingkup mengatur masyarakat dalam hal peribadatan seperti; shalat, zakat, puasa, haji, dan persoalan ibadah lainnya. Adapun *fiqh* mu'amalah dalam pengertian luas adalah mencakup segala perbuatan, kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada segala aspek selain hal yang

berkaitan dengan peribadatan. Sedangkan *fiqh* mu'amalah dalam arti sempit memiliki arti yang bervariasi. Sebagaimana pendapat Bakri (Bakri, n.d.) dalam kitab *I'ānat at-thālibīn* menjelaskan bahwa *fiqh mu'amalah* adalah peraturan mengenai tindakan manusia dengan manusia dalam hal harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, Al-Madkhol (Al-Madkhol, n.d.) berpendapat dalam kitabnya *al-Madkhol al-Fiqh al-'Am*, bahwa *fiqh* mu'amalah adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan pengaturan tentang interaksi antar sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak, serta penyelesaian sengketa di antara mereka, dan juga kekayaan dan pengelolaannya. Hal ini tentu mencakup pembahasan mengenai kebijakan fiskal dan moneter.

Urgensi kajian dari kebijakan fiskal dan moneter ini berpengaruh pada stabilitas harga. Fenomena kenaikan tingkat inflasi di beberapa negara sangat terkait dengan dinamika sektor moneter dan fiskal. Perubahan variabel moneter dan fiskal seperti jumlah uang beredar serta pengeluaran pemerintah secara teoritis akan menyebabkan laju inflasi. (Parkin, 2014)

Dalam ekonomi Islam, Chapra seorang pakar ekonomi dari Pakistan yang tinggal di Saudi memiliki pandangan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Islam. Menurutnya, kedua kebijakan itu tidak hanya mengatur format penawaran yang seialur dengan permintaan riil terhadap uang, namun dalam ekonomi Islam menurutnya untuk menutupi keperluan biaya defisit pemerintah yang sejatinya itu riil dan mencapai target sosio-ekonomik. Kebijakan moneter dapat menjalankan beberapa instrumen seperti saham publik terhadap deposito unjuk, cadangan wajib resmi dan masih banyak lagi.

Secara umum kebijakan fiskal merupakan penyaluran dalam pengeluaran serta penerimaan pemerintah guna menutupi kondisi perekonomian. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan dalam perekonomian untuk menunjukkan arah perekonomian agar menjadi lebih sehat dan baik melalui metode transformasi pengeluaran dan penerimaan pemerintah. (Rahayu, 2014)

Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal dan tercapainya orientasi ekonomi makro. Adapun keseimbangan internal adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, kestabilan pada harga, terciptanya pembangunan yang rata. Sedangkan, untuk keseimbangan eksternal adalah keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter akan berdampak pada sektor yang riil seperti investasi, konsumsi, impor, ekspor dan terakhir adalah tingkat inflasi. (Warjiyo, 2003)

Menurut Chapra (Chapra, 2000a), kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terletak pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Urgensi stimulus fiskal adalah untuk mengatasi krisis ekonomi. Ekonomi Islam lebih menganjurkan pendekatan yang lebih luas yang mencakup tujuan-tujuan sosial dan etika. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan. Ekonomi Islam menekankan bahwa pengeluaran pemerintah harus memprioritaskan investasi di sektor-sektor yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Begitu pun adanya konsep perpajakan progresif untuk memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil

Sedangkan, kebijakan moneter Islam menurut Chapra (Chapra, 2000) berbeda dengan kebijakan moneter pada umumnya, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate*

return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya

Apabila mengacu pada Teori kebijakan fiskal dan moneter dari konvensional, misalnya pendapat dari John Maynard Keynes adalah untuk menambah tingkat *output agregat* serta mengatasi problem pengangguran di dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan moneter menurut Keynes untuk memanipulasi total supply uang yang berotasi di pasaran serta tingkat suku bunga. Pemikiran tentang kebijakan fiskal dan moneter ini dikenal sebagai teori keynesian. (Wepo, 2023) Pemikiran Keynes ini sangat berpengaruh di dunia perekonomian terutama dalam dalam Perjanjian Bretton Woods di tahun 1946 dan dalam pembentukan Dana Moneter International (International Monetary Fund, IMF). (Komalasari, 2015)

Instrumen-Instrumen dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam terdapat dua instrument: 1) Kebijakan perolehan yang berkaca pada konsep perpajakan. Kebijakan ini seperti anggaran pendapatan negara yang dapat diperoleh dari Ziswa (Zakat, Infaq, Sedekah & waqaf), *Kharaj* (Pajak), *Jizyah* (pajak dari non-muslim), *Khums* (harta *ghanimah* yang diperoleh dari hasil peperangan), *usyur* (pajak perdagangan barang yang masuk ke negara muslim), pinjaman, dan perolehan lain (*denda* atau *kaffarat*); 2) Kebijakan pengeluaran yang mencakup proses pengelolaan pengeluaran negara, atau proses pembelanjaan negara dan penyaluran pendapatan negara terdistribusi secara merata. (Aini, 2019)

Apabila mengacu pada pandangan Chapra (Chapra, 2000b) ada beberapa instrumen yang dapat melaksanakan kebijakan moneter, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Target pertumbuhan dalam M dan M_0 .
Target pertumbuhan dalam M ini mesti ditinjau setiap kuarta atau kapan saja jika diinginkan. Hal ini ditinjau dari perekonomian, dan variabel lainnya. Selanjutnya pertumbuhan pada M_0 (*high powered money*). Hal ini membutuhkan kebijakan fiskal yang memiliki orientasi tertentu. Dalam rangka merealisasikannya bank pusat mesti mengkalkulasi M_0 yang diciptakannya itu ada.
2. Saham Publik pada Deposito (*public share of demand deposit*) atau uang giral.
Pada totalan tertentu deposito unjuk setiap bank komersial maksimal 25% mesti disalurkan pada pemerintah guna membiayai setiap proyek sosial yang menjanjikan.
3. Surplus neraca pembayaran
Setiap negara yang mengalami surplus, dimana kejadian itu tidak ada pada sektor swasta dan tidak menjadi dampak ekspansi pada penawaran uang. Ini terjadi akibat pemerintah yang menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestik. Maka dari itu neraca pembayaran di sektor swasta tidak merubahnya dengan tepat. Maka pengeluaran pemerintah harus diatur berdasarkan kompetensi ekonomi agar menghasilkan tawaran yang begitu riil.
4. Cadangan wajib resmi
Setiap bank komersial mesti memiliki cadangan wajib yakni sebesar 10-20%. Hal ini berguna untuk jaminan terhadap deposito serta sekaligus penyediaan likuiditas.

5. Limitasi Kredit

Instrumen ini ditetapkan oleh Bank Sentral yang menetapkan dikurangi atau ditambahinya kredit. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

6. Teknik yang lain

Dalam merealisasikannya perlu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, seperti rayuan moral (moral suasion) yang akan memosisikan secara penting pada bank sentral dalam perspektif Islam.

Berdasarkan penjabaran diatas diketahui bahwa setiap instrumen memiliki ciri yang implementasinya merupakan sebuah teknik yang mengikat maupun tidak mengikat. Artinya, instrumen itu dikenakan pada setiap objek pembayar tertentu yang memiliki sanksi khusus dari negara bagi yang tidak melaksanakannya. Misalnya, penerapan pada instrumen pendapatan negara seperti zakat yang hanya dapat berlaku dan mengikat bagi mereka yang harta wajib zakatnya mencapai limit *nishab* (minimum batas harta terkena zakat). Sedangkan, yang tidak mengikat ini seperti *shadaqah*, *infak* dan wakaf. Sedangkan instrumen lainnya seperti *kafarat*, pinjaman dan *khums* itu bersifat kondisional, atau untuk *khums* sekarang ini di Indonesia sudah tidak dipakai lagi, karena tidak adanya peperangan.

Implementasi Nilai Islam dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat tentu akan memiliki dampak positif yang kuat terhadap terjadinya kestabilan ekonomi dan mampu menahan laju inflasi (Auerbach et al., 2010). Oleh karena itu, isu kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter terkait stabilisasi mikro hingga makro ekonomi menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir (khususnya di Indonesia). Beberapa penelitian telah mengkaji peran kebijakan fiskal dan moneter terhadap stabilisasi harga serta pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Secara umum, kebijakan fiskal diperuntukkan agar kestabilan ekonomi diperoleh negara melalui pendapatan nasional yang terus meningkat dengan pemanfaatan sumber daya dan pengaruh aktivitas masyarakat tanpa harus menafikan redistribusi perolehan dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk memperoleh setiap dana dan kebijaksanaan melalui pembelanjaan dana tersebut untuk pembangunan. Ringkasnya, kebijakan ini berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran negara.(Mansur, 2013)

Sedangkan kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dibuat untuk memperoleh kestabilan ekonomi makro, layaknya kestabilan harga, menumbuhkan ekonomi, lapangan pekerjaan kerja tersedia. Hal itu harus ditempuh melalui *trade-off* yang memuat variabel-variabel tersebut.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya mengarahkan kebijakan fiskal menuju keadilan sosial dan keberlanjutan. Perspektif ekonomi Islam dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mengukur relevansi teori-teori mereka dalam konteks ekonomi saat ini. Mengambil salah satu ekonom Islam yakni Chapra yang memaparkan bahwa ekonomi Islam terkait penegakkan kebijakan fiskal dan moneter tertata pada keadilan sosial dan keberlanjutan memberikan pelajaran kebijakan yang berharga, terutama dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Stimulus fiskal harus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, mempromosikan keadilan distributif, dan menjaga kesejahteraan masyarakat luas.

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa keberhasilan stimulus fiskal tidak hanya diukur dari pemulihan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dari potensinya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mencapai tujuan-tujuan sosial yang komprehensif.

Para pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari pandangan Chapra dalam prinsip ekonomi Islam untuk mengembangkan strategi yang memprioritaskan hasil ekonomi yang adil dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari intervensi kebijakan. Positifnya kebijakan fiskal memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ekonomi. Efektivitas kebijakan fiskal harus dinilai tidak hanya berdasarkan pada pemulihan ekonomi jangka pendek tetapi juga pada kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Dalam ekonomi Islam menurut Chapra penting untuk menekankan dalam ranah distribusi sumber daya yang adil dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Nilai keadilan dan kesejahteraan merupakan nilai yang harus ada dalam penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini menyelaraskan dengan corak Hukum Islam yang memiliki prinsip dikenal dengan istilah *mabādī as-syari'at*. Prinsip hukum Islam ini terdiri dari nilai *at-tauhid*, *al-'adalah*, *al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar*, *tasamuh*, *al-musāwat* dan *al-huriyyat*. (Hakim, 2011) Prinsip-prinsip tersebut harus ada dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang *mu'āmalah māliyah* (pandangan sempit mengenai *mu'āmalah*). *Mu'āmalah māliyah* (*mu'amalah* keuangan) merupakan bagian kecil dari *mu'āmalah* itu sendiri, karena lingkup *mu'āmalah* sangatlah luas yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia untuk mendukung kehidupan di akhirat (Fathurahman, 2015).

Implementasi Nilai Islam dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter tidak hanya berkaitan dengan instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter, tetapi juga menyangkut orientasi kebijakan yang berpijak pada tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), menjaga stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan fiskal maupun moneter tidak hanya diukur melalui indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, atau tingkat pengangguran, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, berkurangnya kesenjangan ekonomi, dan terpeliharanya nilai-nilai keadilan sosial (Chapra, 2000).

Dalam konteks kebijakan fiskal, Islam mengenal berbagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat permanen maupun insidental, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, dan pengelolaan aset publik (*milkiyyah 'ammah*). Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi mekanisme pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki karakter yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara bersamaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan dan pembangunan ekonomi berlangsung secara inklusif (Chapra, 2008).

Di sisi lain, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dibangun atas prinsip larangan riba, gharar, maysir, dan berbagai praktik spekulatif yang dapat menimbulkan

ketidakstabilan ekonomi. Sistem moneter Islam lebih menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi didukung oleh aktivitas produksi yang nyata. Instrumen moneter tidak diarahkan untuk mendorong ekspansi uang secara berlebihan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, stabilitas nilai mata uang, pengendalian inflasi, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara lebih sehat dan berkeadilan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal dan moneter menuntut adanya tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang berlandaskan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang karena seluruh sumber daya pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga keadilan (*al-'adl*) yang memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kebijakan fiskal dan moneter yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan ekonomi publik hendaknya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara seimbang antara aspek material dan spiritual.

KESIMPULAN

Urgensi kajian dari kebijakan fiskal dan moneter ini untuk meninjau pengaruhnya pada stabilitas harga dan membaca fenomena kenaikan tingkat inflasi di beberapa negara yang berkenaan dengan dinamika sektor moneter dan fiskal. Dalam ekonomi Islam pandangan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak hanya mengatur format penawaran yang seialur dengan permintaan riil terhadap uang, namun dalam ekonomi Islam menurutnya untuk menutupi keperluan biaya defisit pemerintah yang sejatinya itu riil dan mencapai target sosio-ekonomik. Kebijakan moneter dapat menjalankan beberapa instrumen seperti: Kebijakan ini seperti anggaran pendapatan negara. Lalu, kebijakan pengeluaran yang mencakup proses pengelolaan pengeluaran negara. Lalu, Target pertumbuhan dalam M dan M_o, Saham Publik pada Deposito (*public shar of demand deposit*) atau uang giral, Surplus neraca pembayaran, Cadangan wajib resmi, Limitasi Kredit dan beberapa Teknik yang lain.

Kebijakan mengatur uang (moneter) dan anggaran negara (fiskal) tidak hanya fokus pada memastikan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk membiayai kebutuhan negara yang penting, seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Islam menawarkan berbagai cara mengatur keuangan negara, seperti: anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, target pertumbuhan uang, saham publik pada deposito, surplus neraca pembayaran, cadangan wajib, batas kredit, dan berbagai cara lain. Ekonomi Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam mengatur keuangan negara, tidak hanya

untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat tentu akan memiliki dampak positif yang kuat terhadap terjadinya kestabilan ekonomi dan mampu menahan laju inflasi. Oleh karena itu, isu kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter terkait stabilisasi mikro hingga makro ekonomi menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir (khususnya di Indonesia). Dalam ekonomi Islam hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya mengarahkan kebijakan fiskal dan moneter menuju keadilan sosial dan keberlanjutan, terutama dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Stimulus fiskal harus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, mempromosikan keadilan distributif, dan menjaga kesejahteraan masyarakat luas. Nilai Islam ini terletak pada prinsip keadilan dan kesejahteraan yang ditopang oleh nilai *at-tauhid*, *al-'adalah*, *al-amar al-ma'rūf wa an-nahy al-munkar*, *tasamuh*, *al-musāwat* dan *al-huriyyat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, (2), 43–50.
- Al-Madkhol, M. al-Z. (n.d.). *Al-Fiqh Al-'Am*. Dār al-Fikri.
- Al-Qardawi, Y. (1995). *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*. Rabbani Press.
- As-Shadr, S. M. B. (1987). *Introduction to Islamic Political System*. Islamic Seminary Publication.
- Auerbach, A. J., Gale, W. G. A. H., & H, B. (2010). Activist Fiskal Policy. *Journal Of Economic Perspectives*, 24(4), 141–164.
- Bakri. (n.d.). *I'ānat at-Thalibin*. Isy al-Halaby.
- Chapra, M. U. (2000a). *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000b). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani.
- Fathurahman, A. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas.
- Gustiawati. (2016). Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 11(1).
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah “Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Refika Aditama.
- Kandil, M. (2005). Money, Interest, And Prices: Some International Evidence. *International Review Of Economics And Finance*, 14(2), 129–147.
- Komalasari, P. (2015). Teori Ekonomi Keynes. *ResearchGate*. Last modified. https://www.researchgate.net/publication/323657425_Teori_Ekonomi_Keynes.
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 45–50.
- Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam. In *jurnal*.
- Mukhlis, O. S. (2019). *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Refika Aditama.

- Nguyen, V. B. (2015). Effects Of Fiskal Deficit And Money M2 Supply On Inflation: Evidence From Selected Economies Of Asia. *Journal Of Economics, Finance And Administrative Science. Aedv*, 20(38), 1–5.
- Parkin, M. (2014). *Economics* (11th ed.). Person Education Ltd.
- Rahayu, A. S. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Raji, J. O., Juzhar, J. A. J., & D, M. (2014). Real Money Supply, Price And Fiskal Deficit In Nigeria: Evidence From Multivariate Granger Causality Tests. *Journal Of Economic Cooperation And Development*, 4(4), 85–112.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suntana, I. (2019). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*.
- Warjiyo, P. dan S. (2003). *Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Seri Kebanksentralan No 6.
- Wepo. (2023). *Pemikiran Ekonomi John Maynard Keynes Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Dunia*. <https://an-nur.ac.id/esy/pemikiran-ekonomi-john-maynard-keynes-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian-dunia.html>.